

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TA 2025
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI UTARA**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN	RENCANA AKSI	TIMELINE RENAKSI
A	BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA						
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	22.215.552.000	<p>Melakukan Penyusunan Rencana Strategis Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara</p> <p>III dan IV</p> <p>1. Perencanaan dan Organisasi</p> <p>Melakukan Monitoring Capaian RO pada setiap DIPA di Kanwil Hukum setiap triwulan, termasuk kendala dan alternatif solusi apabila tidak tercapai target RO yang telah ditetapkan</p> <p>I, II, III, dan IV</p> <p>Sinkronisasi Laporan target CRO dengan Penginputan CRO didalam Sakti</p> <p>I, II, III, dan IV</p> <p>Melakukan Monitoring Alokasi Anggaran sesuai dengan besaran SBKU dan SBKK yang ditetapkan</p> <p>I, II, III, dan IV</p> <p>2. Keuangan</p> <p>Melakukan penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Unaudited dan Audited)</p> <p>II, III dan IV</p> <p>Melakukan pemantauan terhadap permasalahan data laporan keuangan;</p> <p>II, III dan IV</p> <p>3. Pengelolaan BMN</p> <p>Melakukan Penyusunan Rencana kebutuhan BMN (RKBMN)</p> <p>Triwulan III</p> <p>Melakukan inventarisasi BMN</p> <p>Triwulan IV</p> <p>Melakukan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN Kanor Wilayah Kementerian Hukum</p> <p>Triwulan I</p> <p>Melakukan Penatausahaan BMN pada Kantor Wilayah</p> <p>Triwulan I, II, III dan IV</p>	

						4. Sumber Daya Manusia	Kementerian Hukum dan SI-ASN Badan Kepegawaian Negara;	Triwulan I dan III	
							Melakukan proses administratif dibidang kepegawaian	Triwulan I, II, III dan IV	
						5. Bidang Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama	Melakukan upaya mitigasi pemberitaan negatif dan mempublikasikan berita positif Kementerian Hukum;	Triwulan I, II, III dan IV	
							Melakukan klarifikasi berdasarkan data dan fakta dan mengarahkan ke kanal pengaduan apabila adanya pemberitaan atau komentar negatif	Triwulan I, II, III dan IV	
							Memberikan tanggapan dan jawaban atas permohonan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku	Triwulan I, II, III dan IV	
						6. Umum	Melakukan inventarisasi dan distribusi peralatan kerja di lingkungan Kantor Wilayah	Triwulan I dan II	
							Melakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai Pengawasan Kearsipan	Triwulan I, II, III, IV	
						7. Bidang Teknologi Informasi	Mengawal dan memastikan penyelenggaraan Transformasi Digital Kementerian Hukum di lingkungan Kantor Wilayah	Triwulan I	
							Memastikan layanan berbasis digital pada Kantor Wilayah berjalan dengan baik	Triwulan I, II, III dan IV	
B DIVISI PEMBENTUKAN REGULASI									
1	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%		Perancang Peraturan	Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Triwulan I, II, III dan IV	
								Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Triwulan I, II, III dan IV
								Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Triwulan II dan IV

		Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	15 orang	715.000.000	Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Triwulan I dan II
							Bimbingan Teknis Perancang Peraturan Daerah	Triwulan III
							Pelaporan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Triwulan IV
2	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	42.610.000	Analisis Hukum	Melakukan Rapat Persiapan (SK Kelompok Kerja dan SK Panitia Pelaksana)	Triwulan I dan IV
			2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	73.484.000	Perancangan Peraturan Perundang-undangan	Melakukan Inventarisasi dan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Triwulan I
3	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Keanggotaan JDIHN di Wilayah Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	73.000.000	JDIH	Pembinaan dan Pengembangan JDIH	Triwulan I, II dan III
							Peningkatan Kapasitas Pengelola Perpustakaan	
		Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	712.000.000	Bantuan Hukum	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penerima dan Pemberi Bantuan Hukum	Triwulan I, II dan III
			2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	117.370.000	Bantuan Hukum	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penerima dan Pemberi Bantuan Hukum	Triwulan I, II dan III

		Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	33.328.000	Penyuluh Hukum	Melakukan Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Menyusun SK Kelompok Keluarga Sadar Hukum Menyusun SK Desa/Kelurahan Binaan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Desa Sadar Hukum/Keluarga Sadar Hukum	Triwulan I, II dan III
4	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	328.547.000	BSK	Melakukan Pembentukan Tim, Koordinasi Pengumpulan Data dan Strategi Kebijakan Melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil analisis kebijakan	Triwulan I, II dan III Triwulan IV
C Divisi Pelayanan Hukum								
1	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	3.838.512.000	Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum	- Sosialisasi Layanan AHU meliputi (Sosialisasi Fidusia, Sosialisasi tentang Badan Usaha/Badan Hukum, Sosialisasi Apostile, Sosialisasi tentang Kewarganegaraan) - Koordinasi dengan lembaga terkait dan Eselon I	Triwulan I, II, III dan IV
		Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%			Melakukan Rakor MPD serta Melakukan penyusunan rekapitulasi laporan pengaduan masyarakat	Triwulan I

2	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	1.959.167.000	Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual	Melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait ke pusat perbelanjaan dan pelaku usaha guna meminimalisir pencegahan pelanggaran ki serta melaksanakan sertifikasi pusat perbelanjaan dilokasi pusat perbelanjaan dengan sistem resertifikasi atau sertifikasi baru	Triwulan I,II,III dan IV
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wiayah	70%			Melaksanakan diseminasi terkait Indikasi Geografis, Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Paten dan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal dan Layanan KI lainnya	
			2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%			Melaksanakan Edukasi Kekayaan Intelektual melalui kegiatan Agenda Guru Kekayaan Intelektual (RuKI) ke Sekolah-sekolah / Perguruan Tinggi Melaksanakan Sosialisasi Pencegahan HKI Melakukan Pendampingan pendaftaran dan koordinasi dalam rangka pendaftaran permohonan HKI	